

USULAN PPM KELOMPOK DOSEN FIS



Judul:

**PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA TAMAN WISATA  
GENILANGIT, KABUPATEN MAGETAN GUNA MENGUATKAN PARIWISATA  
BERBASIS MASYARAKAT**

Diusulkan Oleh

Dwi Harsono, S.Sos., MPA., MA., PhD/NIP. 19740115 200112 1 001

Dra. Fransisca Winarni, M.Si/195901191987022002

Hardian Wahyu Widiyanto, S.Sos., MPA./NIP. 19940428 201903 1 006

Kurnia Nur Fitriana, S.I.P., MPA./NIP. 19850623 200812 2 002

Sofiana/NIM. 17417141029

Leonarde Fernando Allanta Christdeane Maharaja/NIM. 17417144031

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

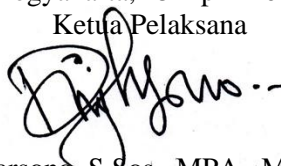
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PPM KELOMPOK DOSEN FIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- 
1. Judul : PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN  
PENGELOLA TAMAN WISATA GENILANGIT,  
KABUPATEN MAGETAN GUNA MENGUATKAN  
PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT
2. Ketua Pelaksana :  
a. Nama Lengkap dengan Gelar : Dwi Harsono, S.Sos., MPA., MA., PhD  
b. N I P : 19740115 200112 1 001  
c. Pangkat / Golongan : III/d, Penata Tingkat I  
d. Jabatan Fungsional : Lektor  
e. Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial / Administrasi Publik - S1  
f. Bidang Keahlian : Governance dan Administrasi Publik  
g. Alamat Rumah : Baturan RT02 RW19 no. 90 Trihanggo, Gamping, Sleman,  
Yogyakarta 55291  
h. No. Telp. Rumah/ HP : +6281339877091
3. Personalia :  
a. Jumlah Anggota Pelaksana: 3 orang  
b. Jumlah Pembantu Pelaksana : 0 orang  
c. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
5. Bentuk Kegiatan : Pendampingan dan Penyuluhan
6. Sifat Kegiatan : Reguler
7. Anggaran Biaya yang Diusulkan :  
a. Sumber dari DIPA UNY 2020 - FIS : Rp. 6.000.000,00  
b. Sumber Lain (.....) : Rp. ....  
Jumlah : Rp. 6.000.000,00

Mengetahui,  
Dekan FIS,

Dr. Suhadi Purwantara, M.Si.  
NIP 19591129 198601 1 001

Yogyakarta, 15 April 2020  
Ketua Pelaksana



Dwi Harsono, S.Sos., MPA., MA., PhD  
NIP 19740115 200112 1 001

## ABSTRAK

Taman Genilangit adalah kawasan wisata seluas 13 hektar yang terletak di kaki Gunung Lawu. Posisi pengelola taman wisata yang bertahan secara mandiri tanpa dukungan dari pemerintah cukup mengkhawatirkan karena mulai bermunculan banyak destinasi wisata dengan konsep serupa namun padat modal. Kapasitas institusi pengelola pariwisata berbasis masyarakat dipandang menjadi factor penting yang mampu untuk memerangi serangan persaingan dari pariwisata masal. Akan tetapi, kapasitas lembaga pengelola taman wisata Genilangit disinyalir masih belum cukup kuat. Hal ini berkaitan dengan sifat pembentukan dan pemeliharanya yang masih bersifat spontanitas. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya pendampingan dari pemerinath yang secara khusus berupaya meningkatkan kapasitas lembaga pengelola. Pelaksanaan kegiatan PPM ini bertujuan untuk; (1) memberikan wawasan pengembangan atraksi pariwisata berdasarkan potensi alam; (2) mendorong pengelola untuk dapat memaksimalkan distribusi manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal; dan (3) meningkatkan kapasitas lembaga pengelola taman wisata Genilangit agar mampu menghadapi tantangan. Metode kegiatan dilakukan melalui kegiatan pendidian, *Focus Group Discussion* dan pendampingan penguatan kapasitas lembaga

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	1
ABSTRAK.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
1. Judul .....	6
2. Analisis Situasi .....	6
3. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah .....	8
4. Tujuan Kegiatan .....	9
5. Manfaat Kegiatan .....	9
6. Kerangka Pemecahan Masalah .....	10
a. Pariwisata Berbasis Komunitas.....	11
b. Pendampingan.....	13
c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.....	14
7. Khalayak Sasaran .....	18
8. Metode Kegiatan.....	18
9. Rancangan Evaluasi.....	19
10. Rencana dan Jadwal Kegiatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
11. Organisasi Pelaksana.....	26
12. Rencana Anggaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
13. Lampiran Usulan .....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pustaka .....	25
2. Curriculum Vitae Pengusul .....	27
3. Gambaran Skenario Program Kegiatan .....	46

**1. Judul : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Taman Wisata Genilangit, Kabupaten Magetan Guna Memperkuat Pariwisata Berbasis Masyarakat**

**2. Analisis Situasi**

Taman Genilangit adalah kawasan wisata seluas 13 hektar yang terletak di kaki Gunung Lawu. Taman Genilangit terletak tidak begitu jauh dari ikon wisata kabupaten Magetan yang sudah cukup terkenal yakni telaga Sarangan. Tepatnya taman Genilangit terletak di desa Genilangit, kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kawasan wisata ini mengunggulkan daya tarik utama berupa udara pegunungan yang sejuk dan dikombinasikan dengan panorama alam yang asri. Lokasi Taman Wisata Genilangit ini terletak di daerah dataran tinggi dan jaraknya cukup jauh dari Kota Magetan kurang lebih 30 menit untuk menuju lokasi tersebut.

Popularitas taman wisata Genilangit meningkat sejak dikenal oleh wisatawan, sebagai destinasi yang menyuguhkan banyak spot untuk berswafoto yang ikonik. Beberapa contoh spot foto diantaranya yakni, ayunan yang berada di ujung tebing, sepeda layang di atas jurang, latar belakang bunga sakura yang dipadukan dengan kostum kimono ala jepang, hingga nuansa tengah hutan yang menenangkan. Wisatawan begitu mengenal tempat ini sebagai destinasi yang menawarkan foto *instagramable* (foto menarik perhatian pengguna media sosial kebanyakan, khususnya Instagram). Di samping itu destinasi ini juga menawarkan berbagai permainanan *outbound*, seperti *Tree House*, *ATV*, serta *flying fox*. Wisatawan yang datang untuk sekedar menikmati suasana alamnya yang masih segar, juga dapat mengakses banyak gazebo yang telah disediakan pengelola. Tarif untuk memasuki kawasan ini tergolong terjangkau, yakni sebesar Rp. 5000,00 (suara.com).



*Gambar 1. Spot foto taman wisata Geni Langit  
sumber: hipwee.com*

Dulunya kawasan wisata ini adalah kebun *bedengan* yang digunakan untuk menanam sayuran dan merupakan tanah milik Perhutani. Masyarakat desa Genilangit yang kebanyakan bermata pencarian petani dan banyak warga disana khususnya pemuda yang menganggur. Hal ini kemudian memicu masyarakat untuk mencari alternative pendapatan dengan memaksimalkan potensi sekitar. Alhasil pada tahun 2017 taman wisata ini resmi dibuka.

Taman wisata Genilangit digagas oleh kelompok Karang Taruna Giri Putra Bhakti. Pada perkembangan selanjutnya, taman wisata kemudian dikelola oleh gabungan antara Karang Taruna Giri Putra Bakti, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Badan Usaha Milik Desa Geni Langit yang baru saja dibentuk. Dengan modal yang cukup terbatas, mereka berupaya membangun taman wisata yang menonjolkan keunggulan dari potensi wilayahnya. Pencapaian yang cukup memabanggakan ialah ketika pada dua bulan pembukaan destinasi, pengelola berhasil mengumpulkan pemasukan hingga mencapai Rp 700.000.000, juta rupiah. Bertepatan dengan momentum tersebut, pemerintah secara resmi membuka taman wisata dengan mengadakan Festival seribu Tumpeng.

Akan tetapi, ternyata hubungan antara pemerintah setempat dengan pengelola wisata menunjukkan adanya ketidakharmonisan. Penelitian lapangan yang telah dilakukan Santoso (2019) menunjukkan jika, masyarakat merasa diabaikan dalam pembangunan pariwisata ini. Pemerintah dianggap absen, dari awal sehingga memaksa warga untuk membangun inisiatif tersendiri. Alhasil bagi pengelola dan masyarakat sekitar, pemerintah dipandang hanya hadir secara simbolis dalam pengesahan. Pemerintah dianggap tidak mendukung pengelolas selama proses pembangunan dari awal, dan cenderung hanya menikmati ketika taman wisata tersebut telah terbangun.

Posisi pengelola yang bertahan secara mandiri tanpa dukungan dari pemerintah cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini disebabkan karena mulai bermunculan banyak destinasi wisata dengan konsep panorama swafoto alam serupa, yang terletak tidak jauh dari taman wisata Genilangit. Beberapa diantaranya seperti, Taman sakura, Lawu Park, Mojosemi *Forest Park* dll. Masalah terbesar dari objek wisata baru ini, ialah sifatnya yang merupakan wisata padat modal milik perseorangan atau perusahaan. Dengan besarnya modal yang jauh lebih besar, tentu atraksi dan fasilitas yang diberikan kepada wisatawan akan lebih lengkap dan menarik. Dikhawatirkan hal ini akan membuat pengunjung taman wisata Genilangit mulai berangsur-angur berpindah.

Kapasitas institusi pengelola pariwisata berbasis masyarakat dipandang menjadi

factor penting yang mampu untuk memerangi serangan persaingan dari pariwisata asal. Akan tetapi, kapasitas lembaga pengelola taman wisata Genilangit disinyalir masih belum cukup kuat. Hal ini berkaitan dengan sifat pembentukan dan pemeliharanya yang masih bersifat spontanitas. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya pendampingan dari pemerintah yang secara khusus berupaya meningkatkan kapasitas lembaga pengelola.

### **3. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

1. Masih rendahnya atraksi pariwisata alam di taman wisata Genilangit
2. Masih belum kuatnya pemahaman pengelola taman wisata Genilangit terhadap potensi pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
3. Masyarakat masih belum mendapatkan banyak manfaat positif dari keberadaan taman wisata Genilangit.
4. Minimnya keinginan warga untuk berperan serta mengembangkan taman wisata Genilangit
5. Minimnya dukungan dari pemerintah setempat terhadap pengembangan pariwisata di Genilangit
6. Adanya ketidak harmonisan hubungan antara pemerintah dengan pengelola taman wisata Genilangit.
7. Kurangnya pemahaman pengelola terkait kondisi institusi pengelola taman wisata Genilangit dalam menghadapi berbagai tantangan
8. Kurangnya kapasitas institusi pengelola taman wisata Genilangit

Berdasarkan berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan masalah yang diajukan untuk dipecahkan dalam program PPM ini yaitu;

1. Bagaimana upaya untuk mengembangkan atraksi wisata berdasarkan potensi alam yang tersedia?
2. Bagaimana upaya untuk memaksimalkan distribusi manfaat dari pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat bagi pembangunan sosial-ekonomi masyarakat lokal?
3. Bagaimana upaya peningkatan kapasitas institusi pengelola taman wisata Genilangit untuk menghadapi berbagai tantangan?



#### **4. Tujuan Kegiatan**

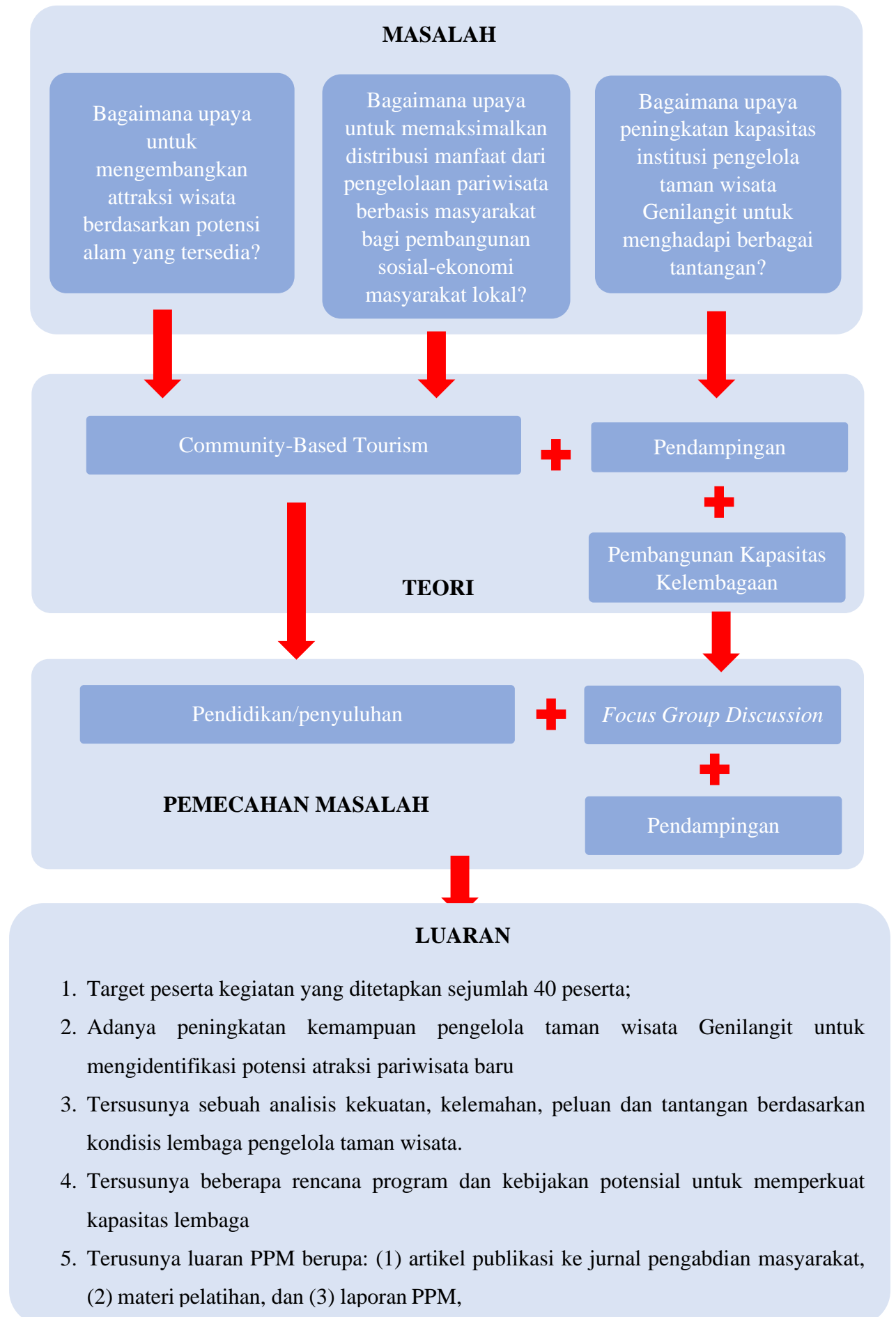
Pelaksanaan kegiatan PPM ini bertujuan untuk; (1) memberikan wawasan pengembangan atraksi pariwisata berdasarkan potensi alam; (2) mendorong pengelola untuk dapat memaksimalkan distribusi manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal; dan (3) meningkatkan kapasitas lembaga pengelola taman wisata Genilangit agar mampu menghadapi tantangan.

#### **5. Manfaat Kegiatan**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari pelaksanaan kegiatan PPM ini yaitu,

1. Bagi Pengelola taman wisata Genilangit
  - a. Meningkatkan wawasan pengelola taman wisata Genilangit untuk mengembangkan pariwisata berdasarkan potensi sekitar
  - b. Mendapatkan alternative mekanisme pendistribusian manfaat dari pengelolaan taman wisata Genilangit bagi pembangunan masyarakat lokal
  - c. Meningkatkan kemampuan pengelola untuk menggerakkan masyarakat lokal guna semakin terlibat agar tumbuh rasa memiliki terhadap taman wisata Genilangit
  - d. Meningkatnya kapasitas lembaga untuk menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan yang akan muncul
  - e. Terjalinya relasi yang baik dengan pemerintah setempat
2. Bagi Jurusan Administrasi Publik UNY
  - a. Menjalankan fungsi tridarma perguruan tinggi
  - b. Mengenalkan nama jurusan Administrasi Publik khususnya, dan Universitas Negeri Yogyakarta umumnya bagi masyarakat Genilangit
  - c. Ikut berperan dalam upaya pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput
  - d. Menjalin relasi dengan pemerintahan setempat

## 6. Kerangka Pemecahan Masalah



### **a. Pariwisata Berbasis Komunitas**

Pariwisata Berbasis Komunitas (*Community-Based Tourism*) muncul sebagai respon dari pariwisata massal yang menciptakan banyak dampak buruk bagi destinasi wisata (Suansri, 2003). Pariwisata massal dianggap memiliki kecenderungan untuk mengeksploitasi sumberdaya ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dari destinasi wisata. Berposisi sebagai alternative pembangunan pariwisata mainstream yang eksplisit, awalnya CBT lahir dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan, mengutamakan pemberdayaan, dan menekankan adanya kemandirian (Giampiccoli, 2012). Alhasil CBT dianggap sebagai konsep pengembangan pariwisata yang menekankan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya dalam suatu paket. Dalam konsep CBT, perlunya keterlibatan masyarakat lokal untuk mengelola dan memiliki wisata bertujuan untuk mengarahkan pengunjung agar meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk mempelajari pola hidup masyarakat lokal.

Partisipasi masyarakat alhasil menjadi bagian utama dalam pengembangan pariwisata dengan konsep CBT. Diyakini penggunaan konsep CBT akan meningkatkan dukungan masyarakat dalam mereduksi dampak negative pariwisata, bersama dengan adanya peningkatan dampak positif. Dalam CBT partisipasi masyarakat terdiri dari dua pola, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pembagian keuntungan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan pariwisata. Lebih lanjut, dikembangkanlah strategi pembangunan wisata berbasis pada partisipasi masyarakat ke dalam tiga prinsip, yakni : (1) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, (2) Kepastian distribusi manfaat bagi masyarakat lokal dari kegiatan pariwisata, dan (3) Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal (Sunaryo, 2013).

Terlibatnya masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata akan membawa manfaat berupa penguatan ekonomi lokal. Bentuk penguatan ekonomi dapat berupa devisa, pendapatan tambahan bagi masyarakat, dan tentunya terciptanya peluang pekerjaan yang dapat diraih masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dianggap seharusnya tidak hanya memberikan perubahan pada segi ekonomi, adanya peningkatan harkat dan martabat, kepercayaan diri, serta terjaganya nilai budaya juga diyakini perlu diperhatikan. Oleh karenanya, berbagai prinsip CBT kemudian

kembali dikembangkan (Mahfud, Mulyani, & Setyawati, 2017), yakni menjadi :

- (1) upaya pengenalan, pendukung dan promosi kepemilikan pariwisata oleh masyarakat,
- (2) Terlibatnya masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata di berbagai sector,
- (3) adanya promosi terkait kebanggaan kepada komunitas pengelola,
- (4) diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup,
- (5) jaminan terhadap keberlanjutan lingkungan,
- (6) dilindunginya ciri khas,
- (7) pengembangan pembelajaran lintas kultur,
- (8) penghormatan diferensiasi kultur dan martabat manusia,
- (9) distribusi keuntungan dan manfaat kepada masyarakat secara proporsional,
- (10) adanya kontribusi dari pendapatan yang khusus dialokasikan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, dan
- (11) mengutamakan orisinalitas relasi masyarakat dengan lingkungan.

Sekian banyaknya prinsip terkadang membingungkan penyelenggaraan CBT. Berdasarkan hal tersebut, berbagai ahli mencoba menterjemahkannya menjadi sebuah *framework* yang diklaim lebih aplikatif (Pakpahan, 2018).

1. *Pertama*, CBT dinilai akan bergantung pada konservasi alam dan justru mampu berkontribusi untuk mencegah terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Asumsi dasar dari pandangan ini, berkaitan dengan kecenderungan CBT yang mengandalkan keunikan lingkungan sebagai atraksi pariwisata yang dijual.
2. *Kedua*, penciptaan peluang pekerjaan dalam dalam kegiatan pariwisata. Implementasi CBT yang tepat, diyakini akan membawa manfaat ekonomi melalui peningkatan pendapatan dari pembagian keuntungan dan peluang pekerjaan, pengentasan kemiskinan, pulihnya kondisi ekonomi dan adanya peningkatan infrastruktur). Keunggulan penggunaan tenaga lokal dalam CBT, berkaitan dengan efek psikologis yang menciptakan kebanggaan sebagai pemilik sumberdaya pariwisata, sekaligus akan menciptakan peredaman terhadap kecemburuan sosial,
3. *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam CBT bermakna penempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata.
4. *Keempat*, CBT dapat meningkatkan kualitas SDM lokal melalui kegiatan pelatihan dan Pendidikan, dukungan terhadap organisasi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas, pembangunan relasi dan keterlibatan masyarakat dalam pariwisata di daerah, serta membukakan peluang untuk

menciptakan adanya tata kelola pariwisata yang baik karena keterlibatan masyarakat dalam perencanaan di segala tingkatan.

5. *Kelima*, perlu dipertahankannya *unique value* seperti adat istiadat, upacara tradisional, kepercayaan, seni pertunjukan tradisional, dan seni kerajinan yang dimiliki masyarakat. Contoh di berbagai destinasi pariwisata dalam konsep CBT, pengunjung diarahkan untuk menginap di rumah penduduk, diajarkan untuk menenun, menari, sehingga lebih mendalam dalam memahami kultur masyarakat. Bahkan pada level ekstrimnya, pengunjung tidak segan-segan meninggalkan identitas orisinilnya, demi memahami dan memperoleh pengalaman unik dan utuh dari kegiatan yang disajikan CBT.

## **b. Pendampingan**

Pendampingan merujuk pada strategi umum yang digunakan pemerintah dan *Non-Governmental Organization (NGO)* dalam melakukan intervensi untuk meningkatkan kualitas individu maupun organisasi, sehingga dapat menempatkan posisinya sebagai bagian dari sebuah permasalahan yang dialaminya, dan berupaya secara aktif untuk mencari alternatif pemecahan masalah tersebut (Hidayah, 2015). Kualitas sumberdaya individu dan kelompok, begitu ditentukan oleh factor keberdayaanya. Dapat dikatakan bahwa pendampingan merupakan strategi yang menitikberatkan kepada, “*making the best of the client’s resources*” (Payne, 1986). Dalam setiap kegiatan pendampingan, oleh karena itu pasti akan selalu memunculkan kegiatan pemberdayaan. Selaras dengan hal itu, pendampingan termasuk menjadi salah satu strategi yang begitu menentukan keberhasilan sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat (Soeharto, 2006).

Mengutip Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan, bahwa pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat dalam mencermati persoalan nyata di lapangan, untuk didiskusikan bersama guna menemukan alternative pemecahan ke arah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat. Inti dari pendampingan ialah upaya pelibatan masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup.

Pendampingan tidak hanya dilakukan sendiri oleh pendamping, tetapi juga perlu disertai adanya keterlibatan masyarakat sebagai subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Tujuan akhir dari pendampingan ialah untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan individu dan kelompok masyarakat yang didampingi

agar dapat hidup lebih mandiri. Secara keseluruhan pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat sebagai subjek, dimulai dari kebutuhan dan kemampuan subjek yang didampingi melalui pengembangan proses interaksi dan komunikasi, serta kesetiakawanan dan solidaritas antar atau inter subjek, serta menumbuhkan kesadaran utuh, guna memerankan posisi sesuai kemampuan yang dimiliki dalam masyarakat (Hidayah, 2015)..

Proses pendampingan sosial umumnya akan berpusat pada empat fungsi, yaitu: pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*) dan dukungan (*supporting*), Suharto (2006).

- a. Fasilitasi, mengacu pada fungsi untuk memberikan motivasi dan peluang bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi berikut, pendamping dapat menjadi model (contoh), memediasi dan negosiasi, membentuk consensus bersama, hingga pengelolaan sumderdaya.
- b. Penguatan, mengacu pada pemberian pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas (*Capacity Building*). Pelaksanaan fungsi dilakukan dengan pemberian masukan positif serta arahan berdasar kepada pengetahuan dan pengalaman pendamping, yang kemudian ditemukan dengan gagasan pengetahuan dan pengalaman subjek yang didampingi.
- c. Perlindungan, mengacu pada interaksi antara pendamping dan lembaga eksternal lain, dengan mengatasmamakan kepentingan masyarakat yang didampingi. Pendamping dapat mengumpulkan berbagai sumber daya pendukung, menggunakan media untuk mengekspos subjek yang didampingi, meningkatkan hubungan dalam masyarakat hingga membangun relasi kerja. Beberapa kasus menunjukkan fungsi ini diselenggarakan melalui peran pendamping yang menjadi konsultan.
- d. Pendukung, pendamping diharapkan juga mampu melaksana tugas-tugas teknis (menyelenggarakan analisis sosial, mengelola dinamika konflik yang berlangsung, membangun relasi, bernegosiasi, membangun *public relation*, hingga pada taraf tertentu mencari dan mengelola sumberdaya selama menyelenggarakan kegiatan.

### **c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan**

Kapasitas mengacu pada, suatu sumberdaya, tingkat kepemimpinan, kemampuan dan keahlian yang memadai, hingga pada perubahan-perubahan yang bernilai baik (Kapucu, Healy, dan Arslan, 2011). Kapasitas sebuah lembaga akan dapat tergambar dari level kapasitas anggotanya, yang dimulai dari tingkat system, organisasi, dan individu (UNDP,1997). Dalam tingkat system, kelembagaan terdiri dari hubungan antar individu, kelompok informal, serta organisasi formal yang memproduksi relasi sosial (Chaskin, 2011).

Kelembagaan merujuk pada pelbagai pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling dan untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Kehidupan keluarga, negara, agama merupakan beberapa contoh sederhana kelembagaan. Lembaga memiliki fungsi dalam tata sosial karena dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga berpadu dengan struktur sehingga tidak hanya mencakup pola aktivitas sosial pemenuhan kebutuhan, tetapi juga mengacu pada pola organisasi untuk melaksanakannya (Roucek, Simamora dan Warren, 1984). Secara lebih abstrak, lembaga juga dapat dipahami sebagai konsep dari pola perilaku sosial yang mengakar dan berlangsung terus menerus (Djogo, Sunaryo, dan Sirait, 2003).

Kelembagaan terdiri dari dua aspek, yakni kelembagaan dan organisasi (Saptana & Syahuti, 2003). Aspek pertama mengacu pada sisi dinamis yang bersifat kultural, dan aspek kedua sisi statis yang memiliki sifat structural. Aspek kelembagaan mencakup perilaku sosial dengan penekanan kajian terhadap, *value, custom, folkways, usage, belief, idea, doctrine, willingness, needs, dan orientation*. Apabila aspek organisasi merujuk pada struktur yang penekanan kajiannya berfokus terhadap aspek peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan (Djogo, Sunaryo, dan Sirait (2003). Perbedaan ini memberikan bermanfaat untuk menyajikan cara pandang lebih mendalam terhadap kelembagaan.

Penguatan atau pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi dan kelompok masyarakat guna mencapai tujuan yang telah dicitakan (Brown, 2001). Pembangunan kapasitas

mencakup banyak komponen, sehingga di dalamnya terdapat beberapa dimensi dan focus yang merupakan bagian dari proses dinamis dan berkelanjutan. Dimensi Dan focus pengembangan kapasitas terbagi dalam 3 tingkatan (Soeprato,2003)

1. Individual, merujuk pada potensi, ketrampilan, pengelompokan pekerjaan, dan motivasi dari individu dalam organisasi.
2. Organisasi, mengacu pada struktur organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, pengambilan keputusan, pengelolaan sumberdaya, serta relasi dan *networking* dari organisasi.
3. Sistem, merujuk pada kerangka kerja yang berkorelasi dengan peraturan, kebijakan, serta kondisi dasar dalam rangka pencapaian kebijakan tertentu.

Inti dasar dari pengembangan kapasitas merujuk pada bagian dari proses pembelajaran. Akan tetapi seringkali, penggunaanya diukur sesuai dengan tingkatan pencapaian yang ditetapkan dalam waktu tertentu. Oleh karenanya, pengembangan kapasitas juga dimaknasi sebagai peningkatan atau perubahan dari perilaku individu atau kelompok masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dengan menekankan unsur efektifitas dan efisiensi.

Aspek pembelajaran yang dilakukan terus-menerus dalam proses pengembangan kapasitas diyakini dapat meningkatkan kinerja. Adanya pengaruh dari penguatan dan pengembangan kelembagaan, membuat pengembangan kapasitas memiliki makna yang luas. Cakupannya meliputi seluruh level dalam sebuah organisasi atau lembaga, dan berkaitan dengan kemampuan dari sebuah lembaga untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Grindle, 1997).

Arah dari pengembangan kapasitas kelembagaan ialah untuk pemenuhan kebutuhan anggota melalui peningkatan akapasitas. Secara sosial-ekonomi lembaga diharapkan untuk dapat; (a) mampu memperhankan kelangsungan hidup, (b) mengadakan inovasi yang dipandang lingkungan memiliki nilai intrinsik yang dapat diukur menggunakan indikator tertentu, dan (c) menempatkan pola inovasinya menjadi nilai normative bagi kesatuan sosial lain dalam system sosial yang lebih besar (Jiri Nehnevajsa 1966)..

Guna memaksimalkan potensi individu, organisasi atau system pengembangan kapasitas memiliki tahapan tersendiri dalam menjalankan kegiatan. Prosesnya



dimulai dengan fase persiapan, analisis, perencanaan, implementasi dan tentunya diakhiri dengan evaluasi (Gandara,2008). Fase tersebut merupakan tahapan umum yang tentunya masih perlu didetailkan kembali supaya lebih terperinci.

Terdapat berbagai hal yang mempengaruhi pengembangan kapasitas kelembagaan. Soeprapto (2003) menyebutkan lima factor yang berpengaruh ialah:

1. komitmen bersama, kegiatan pembangunan kapasitas memerlukan waktu cukup lama disertai komitmen jangka panjang, yang didukung oleh keterlibatan semua pihak. Komitmen memiliki pengaruh yang kuat karena menjadi pondasi dari seluruh kegiatan dan tujuan yang akan dicapai.
2. Kepemimpinan kondusif, merujuk pada kegiatan intervensi dari pimpinan terhadap bawahannya guna mencapai tujuan. Sifat kondusif merujuk pada kedinamisan yang memungkinkan terbukanya peluang luas kepada setiap elemen organisasi dan system dapat mengembangkan kapasitas. Kondisi kepemimpinan kondusif akan memantik terjadinya reformasi peraturan.
3. Reformasi kelembagaan, mengacu kondisi budaya kerja yang diperlukan untuk terjadinya pengembangan kapasitas. Guna menciptakan kondisi tersebut, aspek struktur dan kultural kelembagaan perlu dikelola sebaik mungkin. Keduanya diosisikan sebagai aspek penting dan kondusif untuk membangun pondasi program/kegiatan pengembangan kapasitas.
4. Peningkatan keunggulan dan penyikapan kekurangan dari lembaga. Keunggulan dan kekurangan dari organisasi dapat diidentifikasi dengan anggota yang ada didalamnya. Anggota perlu mengidentifikasi dan mengutarakan sesuai analisis mereka atas keunggulan dan kekurangan dari institusi. Ketika ada kebersamaan dalam pelacakan dan pengakuan, hal tersebut akan mempercepat penyelesaian terhadap kekurangan dan penguatan terhadap keunggulan yang dimiliki.

Pendapat lain, menekankan bahwa pembangunan kapasitas kelembagaan perlu terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal lainnya seperti aspek partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas, dan kepemimpinan. Kuatnya kepemimpinan, manajemen yang baik, dan komitmen juga disoroti sebagai factor yang mempengaruhi pembangunan kapasitas kelembagaan (Israel, 1990).

Tingkat kapasitas suatu lembaga dapat diukur salah satunya dengan menggunakan unsur-unsur yang ada di dalamnya (Esman,1986):

1. Adanya pemimpin, adanya sekelompok individu yang merumuskan tujuan dan program dari lembaga, mengatur tindakan-tindakan lembaga, dan menjaga hubungan lembaga dengan lingkungan.
2. Adanya spesifikasi nilai, tujuan, dan metode yang menjadi dasar tindakan dari anggota
3. Adanya program, yakni tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi dan jasa yang diproduksi lembaga.
4. Adanya sumberdaya, dapat berupa keuangan, fisik, manusia, teknologi dan informasi dari lembaga.
5. Terciptanya struktur internal, struktur dan proses yang diadakan untuk menjalankan kinerja dan pemeliharaan lembaga.

## **7. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran program pengabdian masyarakat ini ialah pengelola Taman Wisata Geni Langit, Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

## **8. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan dilakukan melalui kegiatan pendidikan, *Focus Group Discussion* dan pendampingan penguatan kapasitas lembaga, dengan materi;

1. *Focus Group Discussion (FGD)* terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman institusi.;dan
2. Pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan.
3. Observasi lapangan.

Kegiatan awal mulaya direncanakan dalam 2 sesi pada bulan Juni tahun 2020 dengan target peserta 40 orang. Namun demikian, karena adanya Pandemi COVID 19 membuat pelaksanaan berubah dari rencana awal. Kabupaten magetan pada waktu itu ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat penderita COVID tinggi di Jawa Timur. Alhasil akses dari luar kota untuk keluar dan masuk ke kabupaten di Magetan diperketat. Guna mematuhi protokol kesehatan dan mencegah penyebaran COVID 19, program pengabdian masyarakat kemudian diputuskan dilaksanakan secara daring. Selain itu, untuk mencegah kerumunan di lokasi desa Genilangit, maka jumlah peserta

yang di undang juga dikurangi, yakni 20 peserta. Kegiatan ini kemudian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Namun, demi tetap menjaga kualitas hasil luaran pengabdian yang berkualitas, tim memanfaatkan salah satu anggota pengabdian yang bertempat tinggal di dekat area wisata Genilangit. Sehingga program pengabdian mengkombinasikan antara peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui media daring, dan hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh salah satu anggota tim. Untuk memaksimalkan tahapan daring maka metode yang digunakan langsung mengarah pada *Focus Group Discussion* dan pendampingan. Selanjutnya, kegiatan luring diarahkan untuk mengumpulkan data pendukung hasil dari FGD yang telah diadakan.

<b>Tahapan</b>	<b>Materi</b>	<b>Pendekatan</b>
Kegiatan Daring	Identifikasi potensi wisata baru Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman institusi Perencanaan program dan kebijakan institusi	<i>Focus Group Discussion</i> dan pendampingan.
Kegiatan Luring	Pengamatan keadaan kondisi lingkungan	Observasi lapangan

## 9. Evaluasi

Kegiatan PPM dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan Pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan secara daring/online serta observasi lapangan. Kegiatan FGD dilakukan selama 6 jam 3 kali pertemuan, sedangkan untuk kegiatan observasi lapangan secara langsung, dilakukan selama 3 kali. Sementara itu, kegiatan pendampingan dilakukan secara berlanjut menggunakan berbagai media online seperti email dan pesan singkat WA. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPM ini diukur melalui:

1. Pos tes kemampuan mengidentifikasi potensi wisata baru
2. Pos tes kemampuan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi lembaga pengelola taman wisata Geni Langit.
3. Evaluasi terhadap rencana program dan kebijakan dari hasil analisis

Keberhasilan pencapaian tujuan dari kegiatan PPM ini, dapat diukur berdasarkan parameter yang terdiri dari:

1. Target peserta kegiatan yang ditetapkan sejumlah 20 peserta

2. Meningkatnya kemampuan mengidentifikasi potensi wisata baru
3. Meningkatnya kemampuan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi lembaga pengelola taman wisata Geni Langit
4. Terciptanya rencana program dan kebijakan dari hasil analisis
5. Terusnya luaran PPM berupa: (1) Artikel publikasi ke jurnal pengabdian masyarakat, (2) Materi Pelatihan dan (3) Laporan PPM.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Kegiatan PPM

Hasil dari kegiatan PPM Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Taman Wisata Genilangit, Kabupaten Magetan Guna Menguatkan Pariwisata Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah peserta kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Taman Wisata Genilangit, Kabupaten Magetan Guna Menguatkan Pariwisata Berbasis Masyarakat mencapai 23 peserta yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendara dan anggota pengelola taman wisata Genilangit.
2. Pada awal pelaksanaan pelatihan, untuk mendapatkan gambaran pemahaman para pengelola taman wisata Genilangit, Tim PPM memberikan pre test secara lisan kepada seluruh peserta kegiatan pelatihan. Kegiatan pre test ini akan menjadi masukan bagi Tim PPM dalam melakukan pendampingan. Adapun beberapa pertanyaan dalam kegiatan pre test ini adalah meliputi pemahaman akan: bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan?, bagaimana distribusi manfaat bagi masyarakat lokal dari kegiatan pariwisata, dan bagaimana pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal?
3. Setelah kegiatan pre test, Tim PPM menyampaikan sekilas materi yang dapat digunakan untuk membantu melakukan analisa potensi pengembangan pariwisata. Dalam materi ini ditekankan bagaimana keaktifan kelompok sadar wisata seperti pengelola taman wisata Genilangit memiliki peran sangat krusial untuk menunjang pengembangan sebuah destinasi wisata.
4. Kegiatan selanjutnya dilakukan dengan memulai melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mengaplikasikan materi yang baru diperoleh dari TIM PPM. Dalam tahapan ini setiap peserta diharapkan dapat menyampaikan berbagai macam pandangannya tanpa harus takut merasa aneh atau berbeda. Inovasi menjadi penekanan utama yang coba terus ditanamkan sejak pendampingan. Inovasi yang berasal dari masyarakat lokal dipercaya efektif untuk menggali potensi wisata yang terpendam. Hasil dari FGD yang telah dilakukan kemudian ditampung menjadi bahan dasar untuk pembuatan program/kebijakan pengembangan pengelolaan taman wisata Genilangit.

5. Guna mendukung hasil analisa potensi pariwisata yang dilakukan dalam FGD secara daring, tim PPM kemudian melanjutkan pada kegiatan selanjutnya yakni pengamatan kondisi lapangan. Perwakilan Tim PPM pergi menuju taman wisata Geni langit, berbekal kamera untuk mendokumentasikan potensi pariwisata dan keadaan yang saat ini ada di taman wisata. Dari hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh perwakilan tim, telah didapatkan kondisi keadaan alam yang tersaji di bawah ini.



6. Sejak awal pembangunannya, taman wisata Genilangit telah menyita perhatian publik cukup luas. Banyak wisatawan mulai berbondong-bondong untuk mengunjungi tempat tersebut, yang berasal tidak hanya dari kabupaten Magetan tetapi juga dari banyak luar daerah. Taman wisata Genilangit menarik perhatian publik karena menawarkan atraksi pariwisata alam yang menarik, sebagai alternatif objek wisata kawakan yakni telaga Sarangan. Akan tetapi, sebagai sebuah objek wisata yang dikelola oleh komunitas, taman wisata Genilangit menghadapi ancaman dan tantangan tersendiri. Setelah kegiatan analisa potensi pariwisata, TIM PPM kemudian melanjutkan ke fokus utama pengabdian yakni penguatan kapasitas pengelola. Kegiatan ini dijalankan seperti pada FGD daring pada tahap pertama. Perbedaannya, pada kegiatan FGD kedua pengelola pariwisata telah memiliki bekal dari hasil FGD sebelumnya, dan Tim PPM juga telah memiliki informasi dari hasil pengamatan lapangan. Analisa yang digunakan untuk

membantu identifikasi ini ialah SWOT analisis. Berikut merupakan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan

- a. Strength (Kekuatan) : Pengelolaan berbasis masyarakat menggugulkan nilai-nilai lokal setempat
  - b. Weakness (kelemahan) : Memiliki keterbatasan sumberdaya untuk pengembangan potensi wisata
  - c. Opportunities (Peluang) : Adanya acara/ festival adat lokal yang dapat digunakan untuk menarik wisatawan
  - d. Treatment (Ancaman) : Banyaknya objek wisata baru padat modal yang tumbuh tidak jauh dari taman wisata Geni Langit,
7. Setelah analisa SWOT dilakukan, kegiatan selajutnya ialah mendampingi pengelola taman wisata Genilangit untuk menyusun kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi pengelola. Pendampingan ini berlangsung secara daring tidak langsung. Pengelola menyusun program dan kebijakan yang telah disepakati, kemudian dikirimkan ke Tim PPM untuk mendapatkan umpan balik berupa saran dan perbaikan.
  8. Kegiatan pelatihan ini kemudian diakhiri dengan postes kemampuan pengelola taman wisata Genilangit untuk mengidentifikasi potensi wisata dan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi pengelola. Sedangkan evaluasi untuk kemampuan menyusun agenda dan program kegiatan yang tepat dilakukan selama proses pendampingan.

## **B. Analisis/ Pembahasan Pelaksanaan PPM**

1. Target peserta pelatihan dan pendampingan yang ditetapkan sejumlah 20 peserta. Dari target peserta pelatihan yang ditetapkan sejumlah 20 peserta, ternyata jumlah peserta pelatihan yang hadir melebihi target yaitu sejumlah 23 orang peserta. Peserta tersebut seluruhnya berasal dari pengelola taman wisata Genilangit. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme peserta untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan besar dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan pariwisata berbasis komunitas dan kapasitas organisasi.
2. Materi pelatihan secara garis besar dapat diterima oleh peserta dengan respon yang cukup positif. Hal ini tercermin dari antusiasme peserta ketika menyampaikan pertanyaan, dan gagasan ketika pelaksanaan FGD. Antusiasme ini juga tercermin lewat tingginya kehadiran peserta, dan ketepatan waktu peserta untuk mengikuti pelatihan sampai akhir kegiatan.

3. Pada kegiatan FGD, sikap dan berbagai pertanyaan yang diajukan peserta telah menunjukkan bahwa peserta merasa bahwa pendampingan bermanfaat bagi mereka untuk pengelolaan taman wisata.
4. Paska , pekegiatan serta mulai menyadari tentang berbagai peluang potensi pariwisata yang masih belum dimaksimalkan oleh mereka. Selain itu, yang menjadi hal terpenting ialah bahwa melalui pelatihan mereka mulai memahami bagaimana melakukan analisis kapasitas tentang organisasinya. Analisis mendalam dari organisasi mereka butuhkan untuk mengeksekusi potensi pariwisata yang sebelumnya telah diidentifikasi.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan**

Berikut merupakan faktor pendukung agenda pendampingan pengembangan kapasitas lembaga pengelola taman wisata Genilangit:

1. Pemerintah kabupaten Magetan menaruh perhatian besar pada pengembangan pariwisata di berbagai daerahnya. Bagi pemerintah daerah, pariwisata dianggap menjadi potensi yang selama ini terpendam di Magetan. Potensi ini tidak banyak di lirik, karena dulu tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan kabupaten Magetan sebagai kabupaten kecil di lereng gunung Lawu. Berkat media sosial, potensi pariwisata Magetan mulai diketahui oleh masyarakat di berbagai daerah. Oleh karenanya, era digital ini dipandang sebagai momentum kebangkitan Magetan sebagai daerah yang menyuguhkan pariwisata alam khas pegunungan. Pemerintah daerah magetan tidak segan-segan untuk mendukung berbagai macam kegiatan yang diadakan dengan tujuan untuk menarik wisatawan. Bupati Magetan terkadang sering turun langsung untuk membuka dan ikut meramaikan acara yang digelar di area pariwisata.
2. Semangat dan antusiasime peserta pendampingan menjadi faktor pendukung terbesar kelancaran acara ini. Peserta kegiatan yang berasal dari pengelola taman wisata Genilangit, cenderung memiliki usia muda dan wawasan luas. Hal ini membuat ide dapat mengalir dengan lancar ditengah FGD yang dilaksanakan.

Namun demikian, kegiatan ini tetap menghadapi hambatan yang terkadang sulit untuk ditaklukan.

1. Pandemi COVID-19 tentu saja menjadi penghalang utama yang membuat kegiatan pendampingan ini tidak dapat tersampaikan secara maksimal. Jangka waktu diskusi bersama peserta juga menjadi terbatas, sehingga masih banyak ide dan gagasan lain yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan masih belum terjangkau.



2. Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan bagi rancangan program yang sebelumnya telah disusun. Kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan, sedikit banyak membuat tingkat wisatawan yang berkunjung ke taman wisata Genilangit menjadi terbatas. Alhasil meskipun strategi yang dirancang telah sedemikian rupa, namun dipahami bersama bahwa hal ini tidak dapat maksimal menarik wisatawan.
3. Selain itu, posisi pengelola taman wisata Genilangit yang belum tersinkronisasi seluruhnya dengan BUMDes menjadi tantangan tersendiri. BUMDes merupakan lembaga tersendiri yang memiliki sumberdaya cukup besar bersumber dari Dana Desa. Akan tetapi, dana ini belum seluruhnya dapat dimaksimalkan untuk pembangunan taman wisata Genilangit. Hal ini disebabkan karena adanya dua lembaga yang memiliki kepentingan sama untuk memajukan taman wisata Genilangit.

#### **D. Saran**

Berdasarkan pelaksanaan PPM, tim pengabdian menemukan beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti untuk agenda pelaksanaan selanjutnya. Beberapa saran diantaranya yakni : 1. Pendampingan terhadap pengelola taman wisata Genilangit tidak dapat selesai dalam 1 kegiatan saja. Pendampingan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, hingga lembaga pengelola taman wisata Genilangit dapat dikatakan memiliki kecukupan.; 2. Tim pengabdian perlu mendatangkan pakar pariwisata komunitas yang mampu membantu pengelola taman wisata Genilangit, untuk menghadirkan pariwisata berbasis komunitas yang memiliki daya saing dengan pariwisata padat modal. ; 3. Perlu disusun model pariwisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan di tengah pandemi. Media Virtual Reality dipandang sebagai salah satu alternatif yang paling mendekati. VR membantu para pengguna untuk merasakan pengalaman langsung meski dari kejauhan

## 10. Organisasi Pelaksana

- 1. Ketua Pelaksana** :

  - a. Nama dan Gelar Akademik : Dwi Harsono, MA, MPA, PhD
  - b. NIP : 197401152001121001
  - c. Pangkat/ Golongan : Penata Tk.1/ III D
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Bidang Keahlian : *Governance*
  - f. Fakultas/ Program Studi : FIS/ Administrasi Publik
  - g. Alokasi waktu untuk kegiatan PPM : 8 jam/minggu
  - h. Pembagian Tugas : Koordinator tim PPM, Pendamping *Focus Group Discussion* dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

  
- 2. Anggota Pelaksana 1** :

  - a. Nama dan Gelar Akademik : Francisca Winarni, M.Si
  - b. NIP : 195901191987022002
  - c. Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Bidang Keahlian : Manajemen Strategik
  - f. Fakultas/ Program Studi : FIS/ Administrasi Publik
  - g. Alokasi waktu untuk kegiatan PPM : 6 jam/minggu
  - h. Pembagian Tugas : Penyusun Materi Penyuluhan dan Narasumber dalam Penyuluhan potensi ekonomi pariwisata alam

  
- 3. Anggota Pelaksana 2** :

  - a. Nama dan Gelar Akademik : Kurnia Nur Fitriana, MPA
  - b. NIP : 19850623 200812 2 002
  - c. Pangkat/ Golongan : Penata Muda /III b
  - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

- e. Bidang Keahlian : Manajemen Pelayanan Publik
- f. Fakultas/ Program Studi : FIS/ Administrasi Publik
- g. Alokasi waktu untuk kegiatan PPM : 6 jam/minggu
- h. Pembagian Tugas : Penyusun Materi PPM dan Narasumber Penyuluhan manfaat pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat

**4. Anggota Pelaksana 3 :**

- a. Nama dan Gelar Akademik : Hardian Wahyu Widiyanto, MPA
- b. NIP : 199404282019031006
- c. Pangkat/ Golongan : Penata Muda /III b
- d. Jabatan Fungsional : Staf Pengajar
- e. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik dan Pembangunan
- f. Fakultas/ Program Studi : FIS/ Administrasi Publik
- g. Alokasi waktu untuk kegiatan PPM : 8 jam/ minggu
- h. Pembagian Tugas : Penyusun Proposal dan laporan PPM

**5. Anggota Pelaksana 4 (Mahasiswa) :**

- a. Nama : Sofiana
- b. NIM : 17417141029
- c. Fakultas/ Jurusan : FIS/ Administrasi Publik
- d. Tugas/Aktivitas dalam PPM : Narahubung dan pelaksana tugas administrative
- e. Alokasi waktu untuk kegiatan PPM : 4 jam/minggu

**6. Anggota Pelaksana 5 (Mahasiswa) :**

- a. Nama : Leonarde Fernando Allanta C. M.
- b. NIM : 17417144031
- c. Fakultas/ Jurusan : FIS/ Administrasi Publik
- d. Tugas/Aktivitas dalam PPM : Membantu tugas lapangan dan dokumentasi
- e. Alokasi waktu untuk kegiatan PPM : 4 Jam/ minggu

## 11. Lampiran Usulan

### 1. Daftar Pustaka

- Brown, L. R. (2001). *State of the world 2001: A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society*. WW Norton & Company.
- Chaskin, R. (2001). *Building community capacity*. New York: Walter de Gruyter
- Djogo, T., Sunaryo, S. D., & Sirait, M. (2003). *Kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Esman, Milton J. 1986. "Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga" dalam *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi*. Editor J.W. Eaton. UI Press. Jakarta. Hal 21 – 46.
- Gandara, R. (2008). *Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara*. Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung.
- Giampiccoli, A, Kalis, J. H. 2012. *Community-based Tourism and Local Culture: the case of the amaMpondo*. PASOS
- Grindle, M.S. (Editor). 1997. *Getting Good Government: Capacity Building In The Public Sectors of Developing Countries*. Boston, MA: Harvard Institute For International Development
- Hidayah, N. (2015). *Pendampingan Untuk Penghidupan Keberlanjutan Petani Karet Di Desa Sungai Kunyit Hulu Kec. Sungai Kunyit Kab. Pontianak*" (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel).
- Israel, Arturo. 1990. *Pengembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta: LP3ES
- K.M. Haywood, "Responsible and responsive tourism planning in the community," *Tourism Management*, vol. 9, no. 2, pp. 105–108, 1998.
- Kapucu, N., Healy, B. F., & Arslan, T. (2011). *Survival of the fittest: Capacity building for small nonprofit organizations*. *Evaluation and program planning*, 34(3), 236-245.
- Mahfud, T., Mulyani, Y., & Setyawati, R. (2017). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas: Strategi Komunitas Foodies Dalam Pengembangan Wisata Kuliner Di Balikpapan*. *Prosiding Snitt Poltekba*, 2(1), 105-117
- Nehnevajsa, J. (1966). *Institution-building and Education: Papers and Comments*. A joint publication of the Comparative Educational Administration Subcommittee of CAG and the Interuniversity Research Program in Institution-Building.
- Pakpahan, R. (2018). *Implementasi Prinsip Pariwisata Berbasis Komunitas Di Desa Wisata Nglingga Yogyakarta*. *Jurnal Master Pariwisata (Jumpa)*, 129-146.
- Payne, Malcolm (1986), *Social care in The Community*, London: MacMillan
- Roucek, J. S., Simamora, S., & Warren, R. L. (1984). *Pengantar sosiologi*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Santoso, H. B. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Wisata (Studi di Taman Wisata Genilangit Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan)* (Skripsi, University of Muhammadiyah Malang).
- Saptana, P. T., & Syahyuti, E. (2003). *Transformasi Kelembagaan Tradisional untuk Memperkuat Jaringan Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan*. Bogor: PSEP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Sari, N. (2014). *Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 634-640.
- Soeprapto, R. (2003) *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Government*. *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*

- Suansri, P. 2003. Community Based Tourism Handbook, Thailand : Responsible Ecological Social Tours (REST) Project.
- Suara.com(2019). Taman Genilangit Spot Wisata Kekinian Untuk Turis di Magetan. Akses dari <https://www.suara.com/lifestyle/2019/11/11/115000/taman-genilangit-spot-wisata-kekinian-untuk-turis-di-magetan>
- Suharto, Edi (2006), Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial. Rafika Aditama. Bandung. \_\_\_\_\_. (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- Sunaryo, B (2013). Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media, Yogyakarta, 2013
- UNDP. (1997). Capacity Development. Manajemen Development and Governance Division. Technical Advisory Paper No. 2.

